

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Melinda Fahriani  
melindafahriani98@gmail.com

Maswar Patuh Priyadi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is meant to test the influence of good corporate governance (board of commissioners, board of directors, independent commissioner, and audit committee) to the action of aggressive tax which is measured by using effective tax rates on the manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. The population is all companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. The samples are manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2009-2013 periods. 21 manufacturing companies have been determined as samples by using purposive sampling. The multiple regressions analysis technique is used as the research analysis technique. The classic assumption test has been done before the data is processed. The result of test shows that there is no heteroscedasticity, autocorrelation, and multicollinearity. The result of good corporate governance test to the action of aggressive tax shows that the board of commissioners, board of directors, and independent commissioners show that the existence of influence to the action of aggressive tax. Meanwhile, the audit committee does not have any influence to the action of aggressive tax which has been conducted by the company.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Effective tax rates, The Action of Aggressive Tax.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit) terhadap tindakan pajak agresif yang diukur menggunakan *effective tax rates* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai 2013. Total sampel penelitian ini adalah 21 perusahaan manufaktur yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sebelum data diolah, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Hasil Pengujian *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi dan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

**Kata kunci:** *Good Corporate Governance, effective tax rates, Tindakan Pajak Agresif*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Fatharani, 2012). Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Tujuan perusahaan bisa diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). GCG yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Pedoman GCG diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 di Indonesia ini diterbitkan karena adanya dorongan dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*).

Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Sari dan Martani, 2010). Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani, 2010).

Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*) (Hidayanti, 2013). Pajak dipandang sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan ini. Winarsih dan Prasetyono (2014) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez, 2012)

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa "penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara. Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak terhutangnya.

Penelitian yang mengkaji hubungan GCG terhadap aspek perpajakan terbilang masih sedikit seperti penelitian yang mengkaji tentang pengaruh dari karakteristik kepemilikan perusahaan, praktik *corporate governance* di Indonesia terhadap tindakan pajak agresif. Sari

dan Martani (2010) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam perpajakan daripada perusahaan non-keluarga, dan praktik *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tersebut. Walau nilai koefisien regresi tidak signifikan, namun arah dari variabel *corporate governance* memberi gambaran variabel tersebut dapat memperlemah hubungan tindakan pajak agresif dengan kepemilikan keluarga. Kemudian penelitian yang mengkaji pengaruh GCG dan CSR terhadap tindakan pajak agresif (Winarsih dan Prasetyono, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Selanjutnya penelitian yang berjudul *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis* (Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.

Adapun penelitian yang berjudul pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010 (Fatharani, 2012) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga dan hubungan politik dengan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan serta reformasi perpajakan juga membuat aktivitas perencanaan pajak perusahaan menjadi lebih agresif. Maka berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh GCG terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini akan menambahkan variabel komisaris independen serta menambahkan jangka waktu penelitian yang menjadi keterbatasan pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur.

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi kepada pihak di luar perusahaan. Laporan ini memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan yang di kuantifikasikan dalam satuan uang berkenaan dengan sumberdaya ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kewajiban ini. Laporan keuangan yang paling sering disajikan adalah neraca, perhitungan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas pemilik. Selain itu, pengungkapan dalam catatan merupakan bagian yang terpadu dari masing-masing keempat laporan keuangan dasar ini (Keiso dan Weygandt, 2010:1).

Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut (Harahap, 2004:1). Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### *Good Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance* dilakukan untuk meminimalisasi manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya manajemen laba seringkali terjadi dalam dunia usaha, antara lain aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang lemah, sistem pengawasan serta pengendalian

sebuah perusahaan yang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008:154).

### **Pengertian *Good Corporate Governance***

Sulistiyanto dan Wibisono (2008) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholder*. Ada saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. *Good corporate governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Effendi, 2009:2). Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen bersih, transparan, dan profesional. *Good corporate governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara (Darmawati, 2003).

### **Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi: (1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; (2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; (4) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### **Dewan Komisaris dan Dewan Direksi**

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas

Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif. Dewan direksi bertugas untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang tepat serta menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan (Hanas, 2009).

### **Komite Audit dan Komisaris Independen**

Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Effendi (2009) menyatakan bahwa komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*. Minnick dan Noga (2010) berpendapat bahwa aspek positif dari keberadaan komisaris independen yang menyangkut nilai perusahaan setelah pajak, yaitu dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance* (Sabrina dan Soepriyanto, 2013).

## Pajak Agresif

### Pengertian Pajak Agresif

Kirchler *et al.* (2003) mengemukakan bahwa dari perspektif ekonomi dan terpisah dari pertimbangan hukum, tax avoidance, tax evasion, dan tax flight mempunyai efek yang mirip yaitu pengurangan pendapatan sebagai dasar untuk mengurangi beba pajak. Akan tetapi dari perspektif psikologi dengan adanya perbedaan legal dan pertimbangan moral, beberapa individu menganggap ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. tax avoidance diartikan sebagai suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal, sedangkan tax evasion dianggap sebagai usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang illegal, dan tax flight mengacu pada tindakan memindahkan lokasi transaksi bisnis untuk mendapatkan penghematan pembayaran pajak.

Fatharani (2012) menyatakan bahwa definisi tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat. Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi semakin perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka tindakan tersebut akan dinilai semakin agresif. Perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi dan Hakim, 2013)

Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitiannya. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

### Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif

Tindakan pajak agresif dapat memberikan *marginal benefit* maupun *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapat adalah adanya penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga porsi yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan pajak yang agresif juga dapat memberikan keuntungan kepada manajer baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Selain itu manajer juga berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah suatu tindakan maajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan *marginal cost* yang mungkin terjadi adalah penalty atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan pada perusahaan. Jika kecurangan-kecurangan tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan maka akan berpotensi memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Salah satu contohnya adalah menurunnya harga saham perusahaan. Penurunan harga saham ini adalah sebagai akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan

oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

## PERUMUSAN HIPOTESIS

### Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2013). Nasution dan Setyawan (2007) memaparkan bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Pada akhirnya terjadi pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen .

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

### Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Tugas dari dewan direksi yaitu mengelola manajemen perusahaan agar efektivitas serta efisiensi perusahaan menjadi lebih baik. Perusahaan dan pemerintah mengalami benturan kepentingan. Perusahaan mempunyai kepentingan menaikkan laba yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan pemerintah melihat kenaikan laba sebagai objek pajak yang akan ditagihkan. Keberadaan dewan direksi diharapkan mampu mengurangi benturan kepentingan tersebut. Suranta dan Mahfoedz (dalam Sam'ani, 2008) menyatakan bahwa ukuran dan jumlah dewan direksi mampu mengurangi permasalahan dalam teori keagenan serta mampu membatasi *controlling owner* untuk mengeksploitasi kepentingan *noncontrolling owner*.

H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

### Ukuran Komite Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan (Sinaga, 2011). Jika dikaitkan antara perilaku manajemen dalam menyusun laporan keuangan dengan pajak, perusahaan akan cenderung melakukan penekanan terhadap pajak terhutang yang harus mereka bayar. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit). Maka dari itu, ukuran komite audit diharapkan mampu untuk meminimalisir adanya tindakan pajak agresif perusahaan.

H3: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

### Ukuran Komisaris Independen Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Anggraeni (2011) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan salah satu sarana untuk memonitor manajemen. Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam perusahaan, keberadaan mereka dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Sehingga dapat disimpulkan komisaris independen sebagai pengawas yang mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya komisaris independen lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba, salah satunya adalah mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan meminimalisir adanya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

H4 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisis data-data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sedangkan populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

### Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampel yang bertujuan (*Purposive Sampling*). Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 sampai 2013. (2) Perusahaan tersebut menerbitkan *annual report* dan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode 2009-2013. (3) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2009-2013. Dari proses pemilihan sampel di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua puluh satu perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumentasi, yaitu jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh selain dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang terpublikasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti dari hasil pengolahan pihak lain. Biasanya sumber data sekunder adalah kepustakaan dan dari catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi. Data peneliti yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diambil dari data perusahaan manufaktur yang tersedia di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lain (Y) dan variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain (X). Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

### Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance*.

### Dewan Komisaris

Dewan komisaris (DK) adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Zarkasyi, 2008). Dewan komisaris diukur dengan jumlah keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan pada tahun tertentu.

DK = Jumlah keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan i pada tahun t

### Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen (KI) diharapkan akan dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting. Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Isnanta, 2008). Ada pun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel komisaris independen adalah:

KI = Jumlah keberadaan komisaris independen dalam perusahaan i pada tahun t

### Komite Audit

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas wajib membentuk komite audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya, komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

KA = Jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan i pada tahun t

### Dewan Direksi

Tugas dari dewan direksi (DD) yaitu mengelola manajemen perusahaan agar efektivitas serta efisiensi perusahaan menjadi lebih baik. Perusahaan dan pemerintah mengalami benturan kepentingan. Perusahaan mempunyai kepentingan menaikkan laba yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan pemerintah melihat kenaikan laba sebagai objek pajak yang akan ditagihkan. Keberadaan dewan direksi diharapkan mampu mengurangi benturan kepentingan tersebut. Suranta dan Mahfoedz (2003) dalam Sam'ani (2008) menyatakan bahwa ukuran dan jumlah dewan direksi mampu mengurangi permasalahan dalam teori keagenan serta mampu membatasi *controlling owner* untuk mengeksploitasi kepentingan *noncontrolling owner*.

DD = Jumlah keberadaan dewan direksi dalam perusahaan i pada tahun t

### Variabel Dependen

#### *Effective Tax rates (ETR)*

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Sari dan Martani, 2010). Adapun yang menjadi proksi utama dalam penelitian ini adalah *Effective Tax rates (ETR)* yang dihitung dari:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

## Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan tingkat ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran komisaris independen dan *corporate sosial responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alat statistik deskriptif yang digunakan antara lain mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah suatu model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2007). Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat *histogram* dari *residualnya*.

## Uji Multikolinieritas

Uji *Multikolinieritas* adalah hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. *Multikolinieritas* dapat dilihat dari pertama, nilai *tolerance* dan lawannya. Kedua, *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka model regresi berganda tidak terjadi *multikolinieritas*.

## Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara mengetahui adanya *heteroskedastisitas* atau tidak adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Menurut Ghozali (2007:105) deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.

## Uji Autokorelasi

Uji *Autokorelasi* adalah adanya korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi (Ghozali, 2007:95). Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Cara untuk mendeteksi adanya *Autokorelasi* adalah dengan melihat besaran *Durbin-Watson*.

## Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis ini mengenai ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan ukuran komisaris independen, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena variabel independennya lebih dari satu. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 KI + \varepsilon$$

Dimana :

ETR	= Effective tax rates
a	= Konstanta
DK	= Dewan Komisaris
DD	= Dewan Direksi
KA	= Komite Audit
KI	= Komisaris Independen
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien Regresi
$\varepsilon$	= Standar Error

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik T, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya. Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, Hal ini berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.

### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2007). Ghozali (2007) menyatakan bahwa untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa apabila nilai F lebih besar daripada 4 Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan katalain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.

### Uji t

Uji parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t-test ini pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan varians variabel dependen (Ghozali, 2007). Uji t-test digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antar masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5 %.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien *Determinasi* pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien *determinasi* adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel independen (Ghozali, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	105	3,00	11,00	4,7143	1,94004
DD	105	3,00	10,00	5,2667	1,79886
KA	105	2,00	5,00	3,0762	,43179
KI	105	,00	,80	,3914	,14427
ETR	105	,00	,09	,0294	,02044
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Olahan SPSS

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 diatas, didapatkan informasi sebagai berikut:

*Effective tax rates* memiliki nilai mean sebesar 0,0294 dan nilai standart deviasi sebesar 0,02044. karena nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai mean, maka besaran masing-masing variabel *Effective tax rates* untuk setiap obyek observasi relatif sama.

Dewan komisaris memiliki nilai mean sebesar 4,7143 dan nilai standart deviasi sebesar 1,94004. karena nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai mean, maka besaran masing-masing variabel dewan komisaris untuk setiap obyek observasi relatif sama.

Dewan direksi memiliki nilai mean sebesar 5,2667 dan nilai standart deviasi sebesar 1,79886. karena nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai mean, maka besaran masing-masing variabel dewan direksi untuk setiap obyek observasi relatif sama.

Komite audit memiliki nilai mean sebesar 3,0762 dan nilai standart deviasi sebesar 0,43179. karena nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai mean, maka besaran masing-masing variabel komite audit untuk setiap obyek observasi relatif sama.

Komisaris independen memiliki nilai mean sebesar 0,3914 dan nilai standart deviasi sebesar 0,14427. karena nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai mean, maka besaran masing-masing variabel komisaris independen untuk setiap obyek observasi relatif sama.

### Analisis Regresi Berganda

#### Persamaan Regresi

Hasil estimasi koefisien regresi disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Persamaan Regresi**

Model	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.003	.013	
DK	.002	.001	.227
DD	.003	.001	.226
KA	-.006	.004	-.135
KI	.055	.012	.391

Dependent Variable: ETR

Sumber : Olahan SPSS

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$ETR = 0,003 + 0,002DK + 0,003DD - 0,006KA + 0,055KI + \varepsilon$$

Penjelasan persamaan regresi di atas :

Nilai konstanta adalah sebesar 0,003 artinya apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka diprediksi untuk *Effective tax rates* yang diukur dari rasio beban pajak penghasilan dibanding dengan pendapatan sebelum pajak adalah sebesar 0,003. Koefisien regresi untuk Dewan Komisaris sebesar 0,002, Artinya jika Dewan Komisaris naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka *Effective Tax rates* mengalami penurunan sebesar 0,002. Koefisien regresi untuk Dewan Direksi sebesar 0,003, Artinya jika Dewan Direksi naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka *Effective Tax rates* mengalami peningkatan sebesar 0,003. Koefisien regresi untuk Komite Audit sebesar -0.006, Artinya jika Komite Audit naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka *Effective Tax rates* mengalami penurunan sebesar 0.006. Koefisien regresi untuk Komisaris Independen sebesar 0,055, Artinya jika Komisaris Independen naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka *Effective Tax rates* mengalami peningkatan sebesar 0,055.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau *Adjusted R-Square* adalah nilai koefisien yang digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan (*goodness of fit*) linieritas regresi sampel dari linieritas sebenarnya. Atau dengan istilah lain untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R-Square* yang diperoleh disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square Adjusted	R Square	Std. Error
1	.586 <sup>a</sup>	.318	.318	.01689

Predictors: (Constant), KI, DK, KA, DD

Dependent Variable: ETR

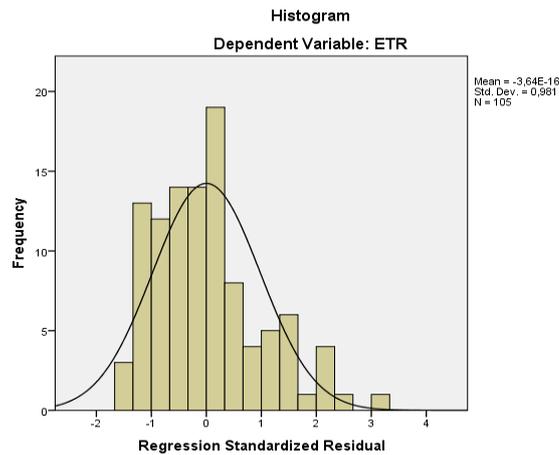
Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,318 yang berarti bahwa *Effective Tax rates* dipengaruhi oleh KI, DK, KA, DD sebesar 31,8% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

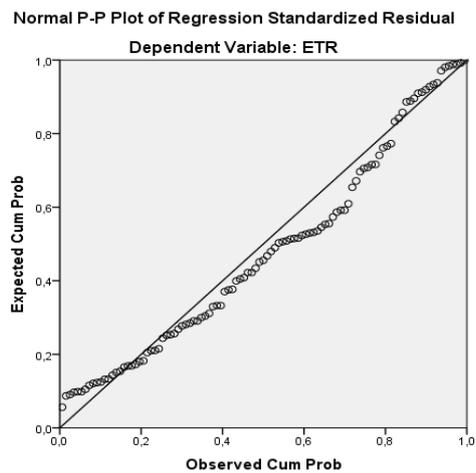
### Uji Asumsi Klasik Data Variabel

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Grafik histogram dan grafik Normal P-P Plot dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Grafik Histogram dan Grafik Normal P-P Plot disajikan dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 1**  
**Histogram Penelitian**  
Sumber : Olahan SPSS



**Gambar 2**  
**Grafik P-Plots**  
Sumber : Olahan SPSS

Menurut Ghazali (2007:112) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi yang normal, maka model regresi memenuhi asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,01656031
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		1,139
Asymp. Sig. (2-tailed)		,150

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa hasil analisis untuk semua variabel adalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal, karena nilai Asymp Sig (2-tailed) >0,05, sehingga dapat disimpulkan data residual terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linier yang sempurna di antara variabel-variabel independen dalam metode regresi. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai TOL (*Tolerance*). Seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Hasil Perhitungan Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DK	.506	1.976
DD	.515	1.941
KA	.906	1.104
KI	.891	1.122

Dependent Variable: ETR

Sumber : Olahan SPSS

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa VIF < 10 dan Tol > 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak mempunyai informasi yang hampir sama. Dengan kesimpulan, antara variabel bebas tersebut tidak memiliki keterikatan atau hubungan yang sangat kuat terhadap variabel bebas lainnya, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian (keseragaman data) sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Pendektasian adanya autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-*

Watson. Nilai *Durbin-Watson* (DW) dari hasil perhitungan regresi seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6**  
**Hasil Perhitungan Auto-Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 <sup>a</sup>	.344	.318	.01689	.793

Predictors: (Constant), KI, DK, KA, DD

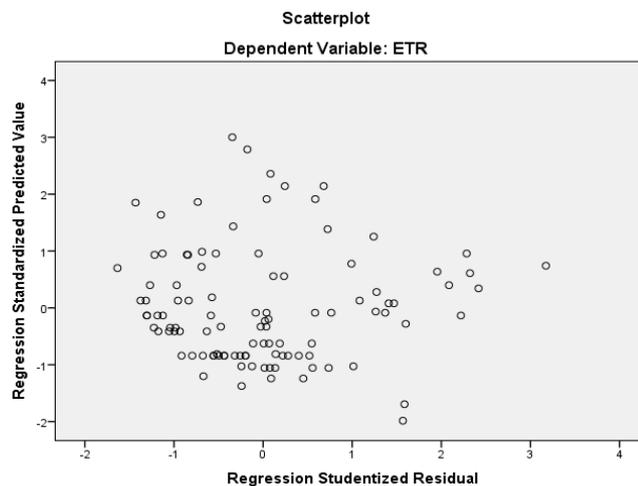
Dependent Variable: ETR

Sumber : Olahan SPSS

Dalam analisis diperoleh nilai DW sebesar 0,793. Jika dicocokkan dengan tabel DW dapat disimpulkan bahwa nilai test *Durbin-Watson* berada pada daerah yang tidak terjadi Auto-Korelasi dalam menentukan keputusan. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independennya.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan Sumbu X adalah residual yang telah di studentized.



**Gambar 3**  
**Grafik P-Plots**  
**Sumber : Olahan SPSS**

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bersama sebaran titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Pengujian Hipotesis Uji F

Pengujian hipotesis pengaruh DK, DD, KA, KI terhadap ETR menggunakan Uji F. Hasil dari pengujian tersebut adalah yang seperti disajikan pada table di bawah ini.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji-F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.015	4	.004	13.102	.000 <sup>b</sup>
Residual	.029	100	.000		
Total	.043	104			

a. Predictors: (Constant), KI, DK, KA, DD

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 13,102. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  berhasil ditolak. Penolakan  $H_0$  dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig 0,000 kurang dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwavariabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, atau dengan kata lain *Effective Tax rates* yang ada dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komisaris Independen.

### Uji Hipotesis Pengaruh Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen dengan variabel dependen menggunakan Uji t. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  untuk masing-masing variabel independen maka hipotesa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian pengaruh secara parsial dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji-T**

Model	B	T	Sig.
(Constant)	.003	.202	.840
DK	.002	1.990	.049
DD	.003	2.003	.048
KA	-.006	-1.588	.115
KI	.055	4.561	.000

Dependent Variabel: ETR

Sumber : Olahan SPSS

**Hasil Uji t GCG dengan proksi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Effective Tax rates*.**

#### **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Effective Tax rates***

Tingkat signifikansi sebesar 0,049 dan menunjukkan angka pengaruh 1,990. Hal ini berarti  $H_1$  terdukung. Ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *Effective Tax rates*, dengan angka pengaruh 1,990 menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates* dapat diartikan apabila semakin meningkat jumlah komisaris independen, maka tindakan pajak agresif yang dilakukan akan semakin tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin kecil jumlah komisaris independen, maka tindakan pajak agresif yang dilakukan akan semakin rendah. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winarsih et al (2014) mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.

#### **Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Effective Tax rates***

Berdasarkan perhitungan didapat bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap *Effective Tax rates* dengan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,003 dengan signifikansi sebesar 0,048 (lebih kecil dari 0,05). Hasil pengujian ini dapat menunjukkan bahwa  $H_2$  terdukung. Ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates*, dengan angka pengaruh 2,003 menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates* dapat diartikan apabila semakin banyak jumlah dewan direksi, maka tindakan pajak agresif akan semakin tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin kecil jumlah dewan direksi, maka tindakan pajak agresif akan semakin kecil. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dan Prasetyono (2014) mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Effective Tax rates***

Berdasarkan perhitungan didapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax rates* dengan mempunyai nilai t hitung sebesar -1,588 dengan signifikansi sebesar 0,115 (lebih besar dari 0,05). Hasil pengujian ini dapat menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax rates*. Hal ini berarti  $H_3$  tidak terdukung, bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax rates*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soepriyanto (2013) mengenai analisis karakteristik *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax rates*. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kunarsih (2012) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective Tax rates***

Berdasarkan perhitungan didapat komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax rates* dengan mempunyai nilai t hitung sebesar 4,561 dengan signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil pengujian ini dapat menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates*. Hal ini berarti  $H_4$  terdukung, bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates* dengan angka pengaruh sebesar 4,561 dapat diartikan bila nilai komisaris independen naik satu satuan maka nilai *Effective Tax rates* akan naik sebesar 4,561 begitu juga sebaliknya jika komisaris independen turun satu satuan maka *Effective Tax rates* akan turun satu satuan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soepriyanto (2014) mengenai analisis karakteristik *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Komite Audit, maka dapat diambil suatu kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun kesimpulannya : (1) Variabel Dewan Komisaris (DK) berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rates*; (2) Variabel Dewan Direksi (DD) berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rates*; (3) Variabel Komite Audit (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rates*; (4) Variabel Komisaris Independen (KI) berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rates*.

### **SARAN**

Saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi pengukuran *corporate governance* secara *comprehensive* (bersama-sama) terhadap agresifitas pajak, misalnya

menggunakan *corporate governance indeks*, sehingga dapat dilihat pengaruh *corporate governance* secara utuh; (2) Memperbanyak sampel penelitian menjadi semua industri yang terdaftar di BEI sehingga dapat diketahui agresifitas tiap perusahaan dan memberikan gambaran keseluruhan industri yang ada di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A. dan L. Kurniasih. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Anggraeni, R. D. 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam *Annual Report*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Darmadi, I. dan R. Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif . Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Darmawan, G. H. dan M. Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9(1): 143-161.
- Darmawati. 2003. *Corporate Governance* dan Manajemen Laba. Suatu Studi Empiris. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 5 (1):47-68.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Advice and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79:145-179.
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fatharani, N. 2012. Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010. Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanas, A. 2009. Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, S. A. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hidayanti, A. N. 2013. Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Isnanta, R. 2008. Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Jimenez, C. E. 2012. Tax Aggressiveness, Tax Environment Changes, and Corporate Governance. Dissertation. University of Florida.
- Keiso, D. E. dan J. Weygandt. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., Schneider, F. 2003. Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do Legal difference matter?. *Journal of Economic Psychology*.
- Lanis, R., dan G. Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Public Policy* 34(1):86-108. Australia.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance* 16(5): 703-718.
- Nasution, M. dan D. Setyawan. 2007. Pengaruh *Corporate* terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Yogyakarta.
- Sabrina, A. dan G. Soepriyanto. 2013. Analisis karakteristik *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif. Skripsi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Sam'ani. 2008. Pengaruh Good Corporate Governancedan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Sari, D. K. dan D. Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance* dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Bandung.
- Sinaga, A. M. 2011. Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Sektor Perbankan Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sulistiyanto, H. S. dan H. Wibisono. 2008. Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Pelaporan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* Pada Sektor Perbankan Di Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kombinasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Winarsih, R. dan S. K. Muhammad. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram
- Zarkasyi, W, A. 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta. Bandung.